



Judul : Biaya Haji Tambah 1,5 T - Tenang, Jemaah Tidak Dibebankan  
Tanggal : Jumat, 03 Juni 2022  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 10

## Biaya Haji Tambah 1,5 T Tenang, Jemaah Tidak Dibebankan

PEMERINTAH dan DPR sepakat menambah kekurangan anggaran untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M sebesar Rp 1,5 Triliun pada Selasa (31/5). Penambahan ini seiring dengan kebijakan Arab Saudi menaikkan harga paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto memastikan, tidak ada penambahan setoran dari jamaah haji yang akan berangkat tahun ini dengan kenaikan anggaran itu. "Jadi, seluruh calon jamaah haji, tidak perlu galau atau risau, kami sudah putuskan," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Yandri mengatakan, penambahan anggaran tersebut bisa ditambal dari dua sumber. Yakni dari hasil efisiensi anggaran haji tahun sebelumnya dari 2014 sampai 2019 dan dari nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). "Itu kita pakai untuk memenuhi peningkatan atau tambahan biaya pelaksanaan ibadah haji," ujar politikus PAN ini.

Selain tidak membebani calon jamaah haji, penambahan biaya haji juga tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia merinci sumber dana tambahan biaya operasional haji 2022 sebesar Rp1.536.637.849.087.

Pertama, biaya Masyair jamaah haji reguler dengan jumlah Rp1.491.625.022.686 (1,4 triliun) nantinya akan diambil dari dua sumber pembiayaan. Pertama, efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp700 miliar dan kedua, nilai manfaat sebesar Rp791.625.022.687.

Kedua, biaya Technical Landing Jamaah Embarkasi

Surabaya dengan biaya tambahan yang diperlukan sebesar Rp25.733.232.000. Tambahan anggaran ini akan bersumber dari efisiensi penyelenggaraan ibadah haji.

Ketiga, selisih kurs kontrak penerbangan dengan jumlah tambahan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp19.279.594.400. Untuk memenuhi tambahan biaya ini akan bersumber dari beberapa aspek seperti, efisiensi valas sebesar Rp 2 miliar, safeguarding sebesar Rp 4 miliar, efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sebesar Rp 13.279.594.400.

Anggota Komisi VIII DPR Ina Ammania menambahkan, Pemerintah Indonesia kudu berkolaborasi dengan negara-negara 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kolaborasi ini dilakukan untuk dapat menghadapi Pemerintah Arab Saudi terkait harga biaya haji yang naik secara tiba-tiba.

"Kita bisa berkolaborasi sama-sama untuk dapat menghadapi apabila Pemerintah Arab ini mengeluarkan sekonyong-konyong harga yang semaunya," ujar Ina dalam keterangannya, kemarin.

Sehingga dari anggota OKI ini, kata Ina, bisa menyepakati apa yang menjadi kemauan negaranya masing-masing. "Jadi Menteri Agama (Menag) bisa mengantisipasi agar tidak seperti sekarang ini pada pemberangkatan haji berikutnya," harap dia.

Kenaikan biaya haji secara mendadak karena tidak ada nilai tawar dan juga nota keberatan. Sehingga, ia berharap ada kolaborasi kuat antar negara-negara anggota OKI untuk bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi. Ini guna mencegah kenaikan biaya tiba-tiba kembali terjadi pada penyelenggaraan haji berikutnya. ■ TIF